BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 452 /KUM/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar maka perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

BAG. HUKUM SETDA BANJAR

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infomasi Dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 05 April 2019

BUPATI BANJAR,



KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 452 /KUM/2019
TANGGAL 5 APRIL 2019

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DTUTUP
KEARSIPAN					
1	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; UU No. 43 Tahun2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2	Arsip Peta Foto Udara	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d; UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d	Selama di dalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l; UU No. 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf l;	Selama Masih Berlaku atau surat-menyurat yang menurut sifatnya	Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
4	Arsip dinamis; aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan :	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Selama masih Berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan hukum

	- SPJ Berikut Lampiran - Dokumen Anggaran dan Otorisasinya - Surat Pencairan Anggaran				
	b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlangsung penyelenggaraannya	Menggangu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
	a. Data informasi pertahanan		Selama status perlindungan masih berlaku	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan Keamanan Negara
	b. Data kekayaan alam yang dilindungi		Selama masih berlaku	Pengungkapan pengusahaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi	Melindungi kekayaan alam yang dilindungi
	c. Data detail stok pangan produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi		Selama masih berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat	Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat
	d. Akta ontentik yang bersifat pribadi dan wasiat		Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
	e. Memorandum/surat-surat dirahasiakan		Selama masih berlaku	Menganggu proses pelaksanaan kegiatan	melancarkan proses pelaksanaan kegiatan
5	Disposisi Surat Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sebelum dan tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG KEPENDUDUKAN					
6	Data pribadi penduduk	UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf I UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 84 ayat (1), (2), dan (3)	Sampai dengan terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/Bupati/Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi Rahasia pribadi seseorang

BIDANG KEPEGAWAIAN					
7	Rincian hasil Ujian Kompetensi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada Persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkapn Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seseorang PNS
8	Hasil Evaluasi tenaga Pengajar dan peserta diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seseorang PNS
9	Data Hasil check up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seseorang PNS
10	Data hasil evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seseorang PNS
11	Data hasil Tes potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seseorang PNS
12	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap Rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses Penegak hukum - Menjaga Rahasia pribadi seorang PNS
13	Data rencana penepatan PNS/ CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan Penyerahan SK	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen hasil siding Baperjakat (Notulen, pertimbangan, rekomendasi, daftar nominasi, rangking pejabat struktural)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Mengungkap Rahasia pribadi seorang PNS - Dapat mengganggu Proses penyusunan Kebijakan menghambat Kesuksesan kebijakan Karena adanya pengukapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

15	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
17	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18	Instrumen Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/ kompetensi PNS/ pejabat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
19	Hasil identifikasi potensi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
20	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlakukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses peyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

21	Soal Tes CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelakanaan tes	Dapat menghambat proses peyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
22	Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
23	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
24	Dokumen pengangkatan pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
26	Keputusan Penjatuhan Hukuman PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, huruf h, dan huruf i	sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

27	Keputusan Penjatuhan Hukuman PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, huruf h, dan huruf i	sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses proses penyusunankebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28	Keputusan Ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses proses penyusunan kebijakan
29	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian: (Kenaikan Pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi Kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN					
30	Kegiatan intelijen terkait dengan ideology, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c; UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)
31	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c;	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
32	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersangketa	Dapat menghambat proses Penegakan hukum	Membantu kelancaran proses Penegakan hukum

33	Rencana Pengawasan usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a	sampai dengan selesainya pengawasan usaha/ kagiatan	Dapat menghambat proses Penegakan hukum	Membantu kelancaran proses Penegakan hukum
34	Dokumen penyelesaian sangketa/konflik lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a	sampai diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat ,menghambat proses Penegakan hukum	Membantu kelancaran proses Penegakan hukum
35	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf b dan i	Sampai dengan diterbitkan-nya keputusan Gubernur	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
36	Rencana Alokasi Bersubsidi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf bdan i	Sampai dengan diterbitkan-nya Keputusan Gubernur	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan diterbitkan-nya Keputusan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
38	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara pelepasan Tanah kas Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan tanah kas Desa	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ungkapa secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	kajian teknis penepatan lokasi dan basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non umum pada Kab/ kota atau lebih	UU No. 14 Tahun 2008 tentang, KIP, pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi Nasional	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

				- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
40	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan tanah	- Dapat merugikan katahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
42	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/ Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai penertiban keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
43	Keputusan mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Kepala/ Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
44	Proses penetapan Keputusan Gubernur Kalsel tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

45	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
46	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI					
47	Berita Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan Dan keamanan negara
48	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan Dan keamanan negara
49	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan Dan keamanan negara
50	Kunci Sistem Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan Dan keamanan negara
51	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan Dan keamanan negara
52	Jalur Komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan Dan keamanan negara
53	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan Dan keamanan negara
54	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan Dan keamanan negara

BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL					
55	Dokumen ijin usaha pertambanan (IUP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
56	Laporan studi kelayakan Usaha tambang (nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d	Sampai dengan terpilihnya	- Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya -Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
57	Data Teknis Potensi Air Tanah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
58	Naskah soal UN/UNPK/UASBN, dll	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59	Proses scanning UN/UNPK/ UASBN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
60	Hasil Test kemampuan fisik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	Dapat megungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia negara
61	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					
62	Dokumen Perijinann (41 jenis izin) beserta lampirannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/perseorangan yang bersifat rahasia

63	Catatan Penilaian Review terhadap Riset unggula Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64	Data Debitur dana bergulir	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada ijin tertulis Dan debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
65	Data keuangan Industri kecil Menengah (IKM) dan usaha Dagang kecil menengah (UDKM)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan
66	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai ada ijin tertulis Dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha konduksif
BIDANG PERTANIAN PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN					
67	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama dipekirakan masih ada	Dapat menyebabkan Rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
68	Dokumen pelangaran hutam yang terkait dengan peredaram penatausahaan hasil hutan/ ilegal loging/illegal tranding yang masih dalam proses	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakkan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakkan hukum berjalan dengan lancara

69	Hasil penelitian potensial sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses indentifikasi	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (ekspoitasi yang tidak terkendali oloh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia (sumber daya plasma nuftah)
70	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat kekayaan penegakan hukum (mempengaruhi proses peyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakkan hukum berjalan dengan lancar
71	Peta Kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan j UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Selama dipekirakan Masih ada potensi sumberdayanya	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindung kekayaan alam
72	Hasil Uji Laboraturium untuk Keperluan Ekspor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Peruhaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu / perbaikan mutu
73	Rencana Operasi Pengawasan Pengkapan Ikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
BIDANG KESEHATAN					
74	Identitas Penderita HIV / AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persutujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

75	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi rekam Medis	UU No. 29 Tahun 2049 tentang Praktek Kedokteran, pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim / pengadilan	Data mengungkap rahasi pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
76	Laporan kasis/diagnosis penyakit pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi radasia pribadi pasien
77	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 44 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
78	Rahasia kedokteran, yaitu menemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran, Pasal 48 dan pasal 51 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
		KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i			
79	Hasil audit medic pada sarana kesehatan	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
80	Hasil audi terkait dengan medical eror	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

81	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dana tau sejenisnya	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 98 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sadiaan farmasi
BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
82	Identitas korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada Persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi
83	Alamat shelter penanggung korban yang sedang ditangani / diberikan pendampingan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan / pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat peroses rehabilitasi
84	Penetuan penerima bantuan kepada pemerintah desa / kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fisik antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan mepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
85	Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV / AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat Mengungkap rahasia Pribadi (menggangu proses pelayanan tehadap kelayan	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan
86	Data Kelyan UPT (Penyandang HIV / AIDS dan eks PSK)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat Mengungkap rahasia Pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga menganggu proses rehabilitasi/penanganan kelayan)	Melindungi rahasia pribadi kelayan

87	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan Karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
88	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara preamtur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
89	Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Melindungi hak Pribadi Pengusaha
BIDANG KOMINFO					
90	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan	- Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengreusakan dan pencurian data)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Melindungi / mengamankan perangkat serta adata

91	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/ berlaku	- Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan / penyalahgunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur Kestabilan penggunaan bandwidth
92	Bandwidth Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/ berlaku	- Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth tahun diluar ketentuan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur Kestabilan Penggunaan bandwidth
93	Sistem Manjemen Database	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/ berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat Menggangu Keamanan Jaringan Komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga Keamanan jaringan komputer

BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA					
94	Rencana Penertiban / penindakan dan penegakan pada obyek tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
95	Informasi perkata pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)
96	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap	UU N0 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan i	Sampai selsainya Kasus	- Dapat menghabatnya Proses Penegakan hokum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan Kebijakan	- Memperlancar Proses Penegakan hokum dan Penyusunan Kebijakan - Sebagai bahan Pertimbangan untuk Melaksanakan Operasi

97	Informasi data Penegak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	- Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum - Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Penegak Hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar Perda) - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
98	Berita Acara Pemeriksaan	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, h, dan i	Selama Proses Pemeriksaan	- Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum - Dapat mengungkap rahasia Pribadi Obyek terperiksa	- Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum - Melindungi data-data pribadi obyek terperiksa
99	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdat sebelumnya disampaikan di persidangan	UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat(2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	1 Tahun	- Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum	- Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum

BIDANG KEUANGAN					
100	Rencana Pelaksanaan Tukar menukar/ Pemindahtanganan Barang Daerah	UU N0 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	- Dapat mempengaruhi penataan silus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
101	Database Objek Pajak dan Retribusi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hokum / yang berwenang	- Dapat meyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi / mengamankan database objek pajak dan retribusi
102	Dokumen Proses Pengadaan / Jasa Pemerintah	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang /jasa sesuai dengan Prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
103	Rincian Harga Perkiraan sendiri (HPS)	UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang /Jasa	Memperlancar Proses penyusunan kebijakan dibidang Pengadaan barang /jasa
104	Dokumen Penawaran dari penyedia Barang/jasa	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Selama Proses Pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian /evaluasi penawaran
105	Susuna Kepanitiaan Pengadaan Barang/jasa melalui LPSE	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b	Selama Proses Pengadaan barang dan jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
106	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai data pesetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data Kekayaan) Pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan pribadi)

107	Laporan keuangan daerah (laporan Keuangan yang belu diaudit)	UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) Uu NO.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 Huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah di audit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
108	Kertas Kerja Pemeriksaan, laporan Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

BUPATI BANJAR,



KHALILURRAHMAN